

**Judul** : MAKI adukan monopoli di proyek BTS  
**Tanggal** : Jumat, 01 September 2023  
**Surat Kabar** : Media Indonesia  
**Halaman** : 4

## MAKI Adukan Monopoli di Proyek BTS

MASYARAKAT Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan dugaan adanya monopoli atau persekongkolan jahat dalam proyek BTS 4G Bakti Kominfo 2021-2022 ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Koordinator MAKI Boyamin, menuturkan laporan dilayangkan ke kantor KPPU, kemarin. Boyamin menegaskan pihaknya melaporkan pemborong paket dua proyek BTS Kominfo lantaran masih ada yang belum dijerat Kejagung. "Proses penanganan perkara

oleh Kejagung belum bongkar semua yang terlibat sehingga dengan proses di KPPU diharapkan akan bongkar dugaan persekongkolan," terang Boyamin. Ia menjelaskan lebih spesifik bahwa yang dilaporkan pihaknya ialah satu nama berinisial JS yang selama penyidikan diduga menjadi salah satu tokoh sentral dalam arus transaksional haram terkait dengan pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti.

Nama JS kerap disebut penyidik ataupun para tersangka melalui pengakuan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). JS merupakan salah satu pihak swasta pengendali dan penghubung antara konsorsium pemenang tender Paket 1, 2, 3, 4, serta 5 pembangunan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan sejumlah pejabat tinggi di Bakti. JS juga diduga sebagai pihak konsorsium dan subkontraktor yang menggarap Paket 1 dan Paket-2 pembangunan 1.435

Laporan itu dilakukan dengan tujuan semua yang diduga terlibat, termasuk dugaan adanya petinggi partai politik bisa terbongkar.

dari 4.200 menara telekomunikasi yang terindikasi melakukan transaksi haram. Bahkan, JS menjadi koordinator bagi para subkontraktor penyedia infrastruktur BTS 4G Bakti. "Pemborong paket dua yang lebih besar nilainya, tapi belum tersangka," tegas Boyamin. Boyamin juga mengemukakan laporan itu dilakukan dengan tujuan semua yang diduga terlibat, termasuk dugaan adanya petinggi partai politik bisa terbongkar.

Dalam menanggapi hal itu, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menerangkan sah saja MAKI melapor dan menilai penyidik Kejagung masih belum membongkar semua uang terlibat. "Silakan saja hak mereka untuk melapor," tegas Ketut kepada *Media Indonesia*, kemarin. Dalam persidangan kasus dugaan proyek BTS, sehari sebelumnya, Dirut PT Chakra Ciri Energi Indonesia Herman Huang hadir memberikan

kesaksian terkait dengan aliran dana yang diduga hasil korupsi BTS. Dia mengaku pernah diminta mengirimkan uang ke PT Anugrah Mega Perkasa dan PT Truba Jaya Engineering, "Truba Rp7 miliar," kata Herman di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (30/8). Saat diperiksa Kejagung, dia baru mengetahui PT Truba Jaya Engineering milik suami Ketua DPR Puan Maharani. Happy Hapsoro. (Ykb/Can/P-2)